

Hasil Penelitian

**ANALISIS KEWENANGAN WALIKOTA PALEMBANG
DALAM MENERTIBKAN ORANG DALAM GANGGUAN
JIWA
(Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007)**



**Oleh :
PAISOL BURLIAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| DAFTAR ISI | iii |

| | |
|--|-----------|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Tujuan Penulisan | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| F. Kerangka Teori | 6 |
| G. Metode Penelitian..... | 11 |
| 1. Jenis Penelitian | 11 |
| 2. Lokasi Penelitian | 11 |
| 3. Informan | 12 |
| 4. Jenis dan Sumber Data | 12 |
| 5. Teknik Pengumpulan Data | 14 |
| 6. Teknik Analisis Data | 14 |
| 7. Sistematika Pembahasan..... | 15 |

| | |
|--|-----------|
| BAB II LANDASAN TEORI ANALISIS KEWENANGAN WALIKOTA PALEMBANG DALAM MENERTIBKAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 | 47 |
| A. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah | 47 |
| 1. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah | 47 |
| 2. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah | 49 |
| 3. Sejarah Pemerintah Daerah | 53 |
| 4. Pengaturan Pemerintah Daerah..... | 54 |
| 5. Kedudukan Pemerintah Daerah | 59 |

| | |
|---|------------|
| 6. Hubungan Lembaga Pemerintah Daerah | 57 |
| B. Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Islam | 58 |
| 1. Pengertian Pemerintah Dalam Islam | 58 |
| 2. Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Islam | 60 |
| 3. Fungsi Pemerintah Dalam Islam..... | 62 |
| 4. Prinsip-prinsip Pemerintah Dalam Islam | 66 |
| 5. Dasar-dasar Pemerintah Dalam dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah | 68 |
| BAB III DESKRIPSI WILAYAH, LEMBAGA DAN KEWENANGAN | 70 |
| A. Sejarah Kota Palembang | 70 |
| 1. Letak Geografis Kota Palembang..... | 73 |
| 2. Visi, Misi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota | 76 |
| a. Visi Dan Misi Walikota Kota Palembang | 76 |
| b. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Palembang dan Staf Ahli Walikota..... | 77 |
| 3. Orang Dalam Gangguan Jiwa Di Kota Palembang | 81 |
| a. Pengertian Gangguan Jiwa | 82 |
| b. Kriteria Umum Gangguan Jiwa..... | 84 |
| c. Macam-macam Gangguan Jiwa..... | 85 |
| d. Tanda Dan Gejala Gangguan Jiwa | 87 |
| e. Penyebab Gangguan Jiwa..... | 89 |
| B. Kewenangan Walikota Yang Diberikan Kepada Dinas Sosial Kota Palembang | 91 |
| 1. Letak Geografis Kantor Dinas Dinas Sosial Kota Palembang | 92 |
| 2. Visi, Misi Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Palembang | 94 |
| C. Kewenangan Walikota Yang Diberikan Kepada Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang | 95 |
| 1. Letak Geografis Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang | 96 |
| 2. Visi, Misi Dan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Kota Palembang | 100 |
| D. Kewenangan Walikota Yang Diberikan Kepada Satpol PP Kota Palembang..... | 101 |
| 1. Letak Geografis Kantor Sat Pol PP Kota Palembang..... | 102 |
| 2. Panca Wira Satya Dan Struktur Organisasi Satpol PP Kota Palembang..... | 105 |

| | |
|---|------------|
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS..... | 106 |
| A. Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007)..... | 106 |
| B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa | 128 |
| C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa..... | 167 |
| BAB V PENUTUP..... | 175 |
| A. Kesimpulan..... | 175 |
| B. Saran..... | 177 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 178 |

ABSTRAK

Saat ini pemandangan beberapa pusat-pusat Kota Palembang banyak terlihat beberapa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hampir setiap bulan ada saja orang dengan gangguan jiwa baru yang datang ke Kota Palembang. Orang dengan gangguan jiwa ini diduga merupakan kiriman dari beberapa daerah. Memang ada beberapa orang dengan gangguan jiwa yang merupakan warga kota Palembang, namun saat ini orang dengan gangguan jiwa di kota Palembang terus bertambah dan tidak tahu asalnya dari mana. Kondisi ini membuat warga kota Palembang cukup resah dengan keberadaan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tersebut. Tiga hal yang diangkat sebagai fokus penelitian ini. Pertama Bagaimana Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa. (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007). Kedua Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa Dan yang ketiga Adalah Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan jenis data kualitatif dan sumber datanya berupa data primer, data sekunder dan data tersier dengan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi adapun teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa, jika dilihat dari sumbernya terdiri dari kewenangan atribusi dan kewenangan delegasi, Pemerintah Kota Palembang melakukan pelimpahan wewenang kepada Dinas-dinas yang terkait. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang, disebabkan karena faktor budaya, yaitu stigma masyarakat terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih sangat buruk baik keluarga pasien maupun masyarakat pada umumnya, mereka masih dikucilkan, tidak dibiarkan melakukan segala aktivitas normal, bahkan diisolasi dari kehidupan sosial dan Tinjauan Hukum Islam, Imam Hasan Al-Banna berkata: "Tidak ada larangan dalam Islam bila seorang kepala negara melimpahkan wewenangnya kepada perdana menteri untuk menangani langsung urusan-urusan rakyat, para ulama fiqih juga telah memberikan rukhsah (dispensasi) dan keringanan selama demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan kaidah yang digunakan adalah melindungi kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Analisis, Kewenangan Walikota, Menertibkan, dan Gangguan Jiwa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk atau manusia ciptaan Allah SWT. Haruslah kita pandai bersyukur kepadanya karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Itulah salah satu buah daripada akal yang jika dipergunakan untuk berfikir maka sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang pandai bersyukur dan berfikir, mensyukuri atas kesempurnaan akal yang diberikan oleh Allah SWT. kepada dirinya jika dibandingkan dengan manusia yang tidak memiliki kesempurnaan akal tapi jika akal itu tidak dipakai dengan baik maka itulah manusia yang lalai dari kebenaran. Lain halnya dengan manusia yang tidak memiliki kesempurnaan akal dari sejak lahir karena memang itu sudah menjadi kodrat ciptaan Allah SWT.

Manusia yang mengalami penderitaan atau gangguan jiwa ini sering dikucilkan oleh teman, sahabatnya bahkan keluarganya sendiri inilah yang menjadi sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh masyarakat terutama pemerintah yang berwenang. Karena bagaiman jika seseorang yang mengalami gangguan jiwa akan bisa mendapatkan pendidikan yang baik seperti manusia lainnya jika dikucilkan karena penampilannya, komunikasinya, interaksi dan aktifitasnya yang tidak baik.

Upaya penyembuhan orang sakit jiwa membutuhkan biaya untuk mendapatkan perawatan kesehatan/mental. Kemalangan bagi kaum yang ekonominya lemah, jika sanak keluarganya mengalami sakit jiwa, anggota keluarganya tersebut biasanya dibiarkan atau kalau tidak, diobati ke paranormal, bahkan kebanyakan dipasung karena dianggap mengganggu dan merugikan masyarakat. Padahal dalam upaya penyembuhan orang sakit jiwa terdapat perawatan dan penanganan khusus, bukan hanya sekedar pemberian obat. Jelas jika membaca ketentuan Pasal 34 UUD 1945 tentang pemberdayaan dan pemenuhan fasilitas kesehatan bagi fakir miskin, menyebutkan bahwa :

- 1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- 3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.¹

Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam menyembuhkan orang sakit jiwa akan lebih jelas lagi jika membaca ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

- 1) Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- 2) Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat wajib melakukan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
- 3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan melibatkan peran serta aktif masyarakat.
- 4) Tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan perawatan penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.²

¹ Pasal 34 Uud 1945 Tentang Pemberdayaan Dan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Bagi Fakir Miskin

² Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 A tahun 1945 ditentukan: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.³ Penelantaran anggota keluarga pada umumnya seringkali terjadi apabila anggota keluarga tersebut menderita penyakit gangguan jiwa.⁴

Dalam penelitian sering ditemukan orang yang menderita gangguan jiwa masih diterlantarkan oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Salah satunya yaitu fasilitas pelayanan kesehatan karena sering ditemukan penderita gangguan jiwa yang terlantar tidak mendapatkan haknya terkait dengan pelayanan kesehatan. Karena ketentuan tersebut telah diatur oleh Pasal 147 Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa :

- 1) Upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
- 2) Upaya penyembuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
- 3) Untuk merawat penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan fasilitas pelayanan kesehatan khusus yang memenuhi syarat dan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Didalam Pasal 42 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan bahwa: “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”⁶

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 A

⁴ <http://Marlisakurniaty.Blogdetik.Com/Sejarah-Schizophren/> Di Akses Pada Tanggal 27 Februari 2018. Pukul 13.30 Wib

⁵ Pasal 147 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

⁶ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Perkembangan di Indonesia sekarang ini, muncul beberapa kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental atau kejiwaan. Seperti kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian di Jakabaring Palembang pada tanggal 3 Maret 2017 oleh orang yang mengalami gangguan jiwa dengan menggunakan senjata tajam. Pada saat itu ketika hendak diamankan oleh anggota kepolisian orang dalam gangguan jiwa tersebut malah menyerang anggota kepolisian dengan senjata tajam, menurut keterangan warga setempat orang dalam gangguan jiwa tersebut telah meresahkan warga sekitar karena sering mengamuk sambil membawa pedang atau senjata tajam⁷

Kemudian kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Abdullah Rusik pada tahun 2013 terhadap Iskandar dengan cara memenggal kepala korban, terdakwa divonis hukuman mati oleh pengadilan Palembang. dan seorang kakak yang tega membunuh adik kandungnya sendiri yang terjadi pada tahun 2015.⁸

Semua kasus tersebut merupakan contoh-contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental atau kejiwaan. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang mengalami gangguan mental tentu membutuhkan perawatan medis yang memadai dengan perlindungan sebagai pasien.⁹

Saat ini pemandangan di beberapa pusat-pusat di Kota Palembang banyak terlihat beberapa orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hampir setiap bulan ada saja orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) baru yang datang ke Kota Palembang. Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini diduga merupakan kiriman dari beberapa daerah. Memang ada beberapa orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang

⁷ <https://www.merdeka.com/peristiwa/polisi-duel-dengan-orang-gila>, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2018 Pukul 11.00 Wib

⁸ Johan Fatzy, "Rizky Pembunuh Adik Kandung Di Ciledug Idap Gangguan Jiwa" <http://news.liputan6.com/>, Lihat Pula Pada <http://news.metrotvnews.com/.../Ynlaw89b-Kakak-Pembunuh-Adik-...Dinyatakan-Gila>, Akses Pada 1 Maret 2018. 11.00 Wib.

⁹ Rosdiayanti, *Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Anti Sosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Uin Sunan Kalijaga, 2017)

merupakan warga Kota Palembang, namun saat ini Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang terus bertambah dan tidak tahu asalnya dari mana.¹⁰

Kondisi ini membuat warga Kota Palembang cukup resah dengan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut. Meskipun Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada tidak mengganggu namun warga tetap merasa takut dan khawatir nanti tiba-tiba mengamuk dan melukai warga.¹¹ Penanganan terhadap kasus ini adalah merupakan tanggung jawab penuh pemerintah Kota Palembang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 yang berbunyi: “Walikota Berwenang Menertibkan Setiap Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa Dan Meresahkan Masyarakat Yang Berada Dijalan, Jalur Hijau, Taman Dan Tempat-Tempat Umum.”¹²

Oleh sebab itu, penulis memandang perlu mengadakan suatu penelitian atau kajian yang lebih mendalam yang dituangkan kedalam sebuah tulisan dengan judul sebagai berikut : **ANALISIS KEWENANGAN WALIKOTA PALEMBANG DALAM MENERTIBKAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007)**

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Bagaimana Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007)?
2. Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa?

¹⁰<https://sumsel.antaranews.com/berita/265846/orang-gila-berkeliraran-di-palembang>, Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2018 Pukul 10.20 Wib

¹¹ <http://palembang.tribunnews.com/2015/05/20/12> Diakses Pada Tanggal 9 Maret 2018 Pukul 10.27 Wib

¹² Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007)?
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa?
3. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini terbagi dua kategori, *pertama* manfaat secara teoritis dan *kedua* manfaat secara praktis

1. Secara teoritis : Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah pengetahuan hukum di Indonesia yang berkaitan dengan Ketentraman Dan Ketertiban
2. Secara praktis: Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan daya motivasi dan dorongan kepada penulis lain untuk mengadakan penelitian yang mengangkat tema tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental perspektif hukum positif dan hukum islam sehingga dapat mengharmonisasikan dan mensinergikan kehidupan di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan (Hukum

Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.

Menurut H.D Stout, Kewenangan adalah pengertian yang bersal dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publi, sedangkan menurut P, Nicholai disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu, hak berisi kebebasan untuk atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.¹³

Kewenangan pemerintah disebut juga dalam peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Pasal 1 ayat (3) yaitu kewenangan adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.¹⁴

Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan jalan memberi perintah / dengan tidak langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cara yg tersedia. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg diperintah. Manusia berlaku sebagai subjek sekaligus objek dari kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan) tetapi juga harus tunduk pada UU (objek dari kekuasaan).

¹³ Dr. Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002), Hlm. 108-109

¹⁴ Lihat Pasal 1 Ayat , Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Tentang : Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Otonom.

Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.¹⁵

Jenis-jenis Kewenangan yaitu:

1) Atribusi

Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.¹⁶

2) Delegasi

Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

3) Mandat

Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Konsekuensi yuridis

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 72

¹⁶ Lihat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

wewenang yang dimiliki seorang pejabat akan berbeda apabila wewenang tersebut bersumber dari pelimpahan wewenang (delegasi) maupun penugasan (mandat).¹⁷

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.¹⁸ Teori ini diharapkan dapat membedah permasalahan yang pertama yaitu: Bagaimana Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007).

Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Islam

a. Tugas Pemimpin Dalam Islam

Imam al Mawardi, seorang 'ulama besar dalam Madzhab as Syafi'i, dalam *'al Ahkâm as Sulthôniyyah* menjelaskan 10 tanggung jawab dan kewajiban seorang penguasa (kepala negara), adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga Islam agar senantiasa berada di atas pondasinya, dan di atas apa yang telah disepakati oleh generasi terdahulu dari umat ini.
- 2) Menerapkan hukum di antara mereka yang berselisih, melerai permusuhan yg terjadi antara mereka yg bersengketa hingga tersebarlah keadilan.

¹⁷ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, Pt. Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm. 130

¹⁸ F.A.M. Stroink Dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm. 219

- 3) Melindungi kesucian serta menjaga kehormatan, agar rakyat dapat beraktifitas dalam kehidupan mereka, dan bepergian kemanapun secara aman dari tindakan penipuan terhadap jiwa atau hartanya.
- 4) Menerapkan hudud (hukum-hukum Allah) untuk menjaga larangan-larangan Allah dari penodaan, serta menjaga hak-hak hamba-Nya dari kerusakan dan eksploitasi.
- 5) Membentengi perbatasan dengan jumlah pasukan yang mampu memberikan perlindungan hingga musuh tidak menguasai secuilpun tanah perbatasan, menodai kesucian padanya, atau menumpahkan darah seorang muslim atau kafir mu'ahid di dalamnya.
- 6) Memerangi siapa saja yang menentang Islam setelah mereka menerima seruan dakwah, hingga mau berIslam atau mau masuk dalam *dzimmah* (sebagai kafir *dzimmi*), guna menegakkan hak Allah SWT dalam memenangkan Islam atas seluruh agama lainnya.
- 7) Memungut harta *fai'* dan berbagai macam zakat berdasarkan apa yang telah diwajibkan oleh syara' melalui nash atau berdasarkan ijtihad, tanpa rasa takut dan tanpa berlaku zalim.
- 8) Menetapkan anggaran pengeluaran dan apa-apa yang sudah menjadi hak dalam *baitul māl*, tanpa berlebihan dan tidak pula kikir, membayarkan pada waktunya tanpa memajukannya dan tidak pula mengakhirkannya.
- 9) Mengangkat para pemegang amanah yang memiliki *kafa'ah* (kapabilitas) dan mengangkat para penasihat pada tugas-tugas yang besar, dan pada tanggung jawab yang berat menyangkut harta.
- 10) Menangani sendiri secara langsung pemantauan dan pengurusan terhadap berbagai urusan, dan senantiasa mencari tahu kondisi yang terjadi; agar dia bangkit dalam mengurus urusan-urusan umat dan menjaga agama, tidak terlalu mengandalkan pembantunya

dalam menunaikan tugas sementara dia menyibukkan diri dengan kenikmatan-kenikmatan jasadiyah atau ibadah, karena adakalanya orang yang dipercaya itu berlaku khianat dan penasihat itu berbuat culas.¹⁹

b. Pelimpahan Wewenang Pemimpin kepada Pihak Lain Dalam Islam

Di antara pemahaman fiqh politik yang dianut oleh Imam Hasan Al-Banna bahwa seorang kepala negara mempunyai tugas dan wewenang tertentu. Tugas-tugas ini mesti ditunaikan oleh kepala negara yang akan dievaluasi oleh rakyat selaku konstituen yang memberikan amanah kepemimpinan. Bila tugas ditunaikan niscaya sang kepala negara akan menuai dukungan dan sokongan dari rakyatnya. Sebaliknya, jika gagal menjalankan kepemimpinan, rakyat berhak meluruskan bahkan melengserkannya dari jabatan.²⁰

F. Metode Penelitian

Adapun metode yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) Peneliti menyadari bahwa memilih jenis tertentu dalam melakukan suatu penelitian. Memiliki konsekwensi tersendiri di dalam setiap proses yang di jalani tentunya harus diikuti dengan konsisten dari awal penulisan hingga akhir. Hal ini sangat penting agar memperoleh hasil yang maksimal serta bernilai ilmiah sesuai dengan kapasitas, jangkauan dan maksud dari pendekatan ini.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah:

- 1) Dinas Sosial Kota Palembang.
- 2) Pemerintah kota Palembang
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
- 4) Panti Sosial Kota Palembang

¹⁹ Halim Nasrul, Nabi Muhammad Pemimpin dunia, (Persada Pres, Jakarta:2014), hlm 37

²⁰ *Ibid.*, hlm 45-46

- 5) Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang

3. Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dinas Sosial Kota Palembang. (Penata TK 1, Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pembina TK 1)
- 2) Pemerintah Walikota Palembang (Biro Hukum dan Masyarakat)
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Bagian Kasib Pengawalan)
- 4) Panti Sosial Kota Palembang (Bagian Pemeliharaan, dan 10 orang pasien yang sudah bisa diajak komunikasi)
- 5) Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang (Kepala Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang).

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Daerah, maka peneliti menggunakan jenis data kualitatif yang bersifat deskriptif analitik dalam menjawab rumusan masalah yang ada. upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹ Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

Dalam hal ini maka peneliti melakukan penelitian dengan jenis penelitian Kualitatif. Karena untuk mengkaji bagaimana Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa (Menurut Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13

²¹ Moh. Nazir, Ph. D. *Metode Penelitian* (Jakarta : Pt. Ghalia Indonesia, 2003), Hlm.16.

Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban).

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang di gunakan dalam membantu penelitian serta menjawab rumusan masalah di atas maka peneliti memerlukan sumber data sebagai berikut :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian oleh peneliti dari objek penelitian yang dikumpulkan melalui opini subjek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap subjek, kejadian atau kegiatan. Data primer didalam penelitian disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *Up to date*.²² Serta Pasal 34 UUD 1945 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Bagi Fakir Miskin, Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 28 A tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 147 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 42 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penertiban Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa.

2) Data Sekunder

Merupakan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian seperti: Buku Hukum dan kekuasaan, Menuju penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih dan bertanggung jawab, Dialektika hukum dan moral, Asas-asas pemerintahan yang baik, Wewenang mahkamah konstitusi dan aplikasinya dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Data Tersier

²² Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2011), Hlm.117

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, serta ensiklopedia.²³

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dengan pertanyaan-pertanyaan bersifat spontanitas yang muncul pada saat melakukan wawancara alam penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada :

- a. Dinas Sosial Kota Palembang. (Penata TK 1, Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan dan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pembina TK 1)
- b. Pemerintah Kota Palembang (Biro Hukum dan Masyarakat)
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Bagian Kasib Pengawalan)
- d. Panti Sosial Kota Palembang (Bagian Pemeliharaan, dan 10 orang pasien yang sudah bisa diajak komunikasi)
- e. Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang (Kepala Keperawatan Rumah Sakit Jiwa Ernaldi Bahar Palembang).

2. Observasi

Metode ini dilakukan untuk mengamati/pencatatan mencari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pasal 28 peraturan daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara melihat data yang terdapat dalam bentuk tulisan.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau

²³ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Universitas Indonesia, 1986), Hlm

melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam proses penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Palembang ini.

7. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari sub Bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Landasan teori yang meliputi teori Kewenangan, Teori Negara Kesejahteraan, Teori Keberlakuan suatu Hukum dan Teori Penegakan Hukum.

BAB III Hasil Penelitian (Struktur lembaga tempat penelitian)

BAB IV Merupakan Analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007).

BAB V Merupakan penutup, berisikan kesimpulan dan saran yang di dasarkan dari hasil analisis penelitian.

Hasil Penelitian

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
(Putusan Hakim Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag)**



**Oleh :
PAISOL BURLIAN**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| ABSTRAK | ix |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Penelitian Terdahulu | 7 |
| E. Metodologi Penelitian | 8 |
| F. Kerangka Pembahasan | 10 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |

BAB II TINJAUAN UMUM

| | |
|---|----|
| A. Pemalsuan Surat | 15 |
| 1. Pengertian Pemalsuan Surat | 15 |
| 2. Jenis-jenis Pemalsuan Surat..... | 15 |
| B. Fiqh Jinayah | 27 |
| 1. Pengertian Fiqh Jinayah..... | 27 |
| 2. Pemalsuan Surat Menurut Fiqh Jinayah | 34 |

BAB III PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah..... | 39 |
| B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah..... | 58 |

BAB IV PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 70 |
| B. Saran..... | 71 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 72 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|-----------|
| LAMPIRAN | 76 |
|-----------------------|-----------|

ABSTRAK

Zaman sekarang adalah zaman dimana segala sesuatu bisa dibuat dengan sekejap mata saja, salah satunya termasuk perbuatan pemalsuan ijazah. Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Pemalsuan ijazah merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama, Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag terhadap kasus pemalsuan Ijazah. Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag di Kayu Agung.

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder yang berupa buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang mempunyai kaitan dengan judul penelitian.

Hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kayuagung tentang pemalsuan ijazah bahwa Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta terdapatnya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut Undang-Undang.

Hukum Islam memandang tindak pidana pemalsuan ijazah diibaratkan sebagai orang yang dusta (berbohong) haruslah diberi hukuman berupa hukuman jilid dan pengasingan.

Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Pidana Islam, dan Pemalsuan Ijazah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan sejatinya merupakan langkah awal manusia untuk mengembangkan dirinya agar dapat berguna baik bagi dirinya maupun orang lain sekaligus bangsa dan negara. Pada perkembangannya pendidikan tidak lagi menjadi sarana bagi manusia untuk mengembangkan dirinya, namun hanya menjadi syarat agar manusia dapat memperoleh pekerjaan, pendidikan menjadi langkah awal manusia untuk mendapatkan pekerjaan. Pentingnya manusia memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri bergeser menjadi pendidikan penting dalam memperoleh pekerjaan

Sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai secara bersamaan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak pidanaupun tidak dapat disangkal. Manusia dalam hidup perlu memenuhi kebutuhan hidupnya berbagai cara dilakukan dan ditempuh untuk kelangsungan hidup. Tidak mustahil hal ini akan timbul perbuatan yang menyimpang atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan undang-undang sehingga sebagai salah satu bentuk tindak pidana. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu

tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan demi kemaslahatan bersama. Tetapi pada zaman sekarang seiring dengan perkembangan zaman salah satunya perkembangan teknologi yang sudah sangat canggih tolong menolong tidak dilakukan dengan semestinya atau disalah gunakan contohnya tolong menolong dalam suatu perbuatan tindak pidana seperti pembuatan Ijazah palsu. Telah dijelaskan dalam QS Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”²

Tindak pidana pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli. Pemalsuan

¹Adami Chazawi. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000). Hlm.

3.

²Al-Qu'an (5) : 2

terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar.³

Kejahatan pemalsuan yang dimuat didalam Buku II KUHP (Kitab Undang Undang Hukum Pidana) dikelompokkan atas 4 golongan, yaitu:

1. kejahatan sumpah palsu (Bab IX);
2. kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI);
4. kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);⁴

Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar kesarjanaan ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.⁵

³H.A.K. Moch. Anwar. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*.(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm. 128.

⁴Jazwi Adami.*Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm 11.

⁵Peter Mahmud Marzuki.*Penelitian Hukum*. (Surabaya: Prenada Media Group, (2010). Hlm 5.

Salah satu tindak pidana pemalsuan dokumen ijazah pernah terjadi diwilayah Pengadilan Negeri Kelas IA Kayuyagung yaitu terhadap putusan pidana dengan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag, yang melibatkan terdakwa Azhar Bin Marwah dimana ia melampirkan berkas salah satunya adalah satu buah berkas calon Kepala Desa Lebung Jangkar, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir atas nama Azhar, satu lembar surat pernyataan calon Kepala Desa yang ditanda tangani Azhar, satu lembar Surat Ijazah Paket A setara Sekolah Dasar No. 11PA0100045, atas nama Azhar, satu Lembar Surat Keterangan hasil Ujian Nasional Paket A atas nama Azhar, satu lembar Ijazah Paket B setara Sekolah Menengah Pertama No. 11PB0076242 atas nama Azhar, satu lembar Surat Keterangan hasil Ujian Nasional Paket B atas nama Azhar.⁶

Berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian sehingga perbuatan terdakwa tersebut di atas yang sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara paling lama 6 tahun.⁷

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk Skripsi yang berjudul:

⁶Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 351/Pid.B/2017/PN.Kag

⁷Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009). Hlm. 187.

**“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Hakim Nomor:
351/Pid.B/2017/PN.Kag)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang diambil peneliti adalah:

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag terhadap kasus pemalsuan Ijazah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag di Kayu Agung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kayu Agung.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pandangan hukum Islam tentang pemalsuan Ijazah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitiann ini yaitu:

a. Bagi Peneliti

Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan khasanah ilmu baru mengenai tindak pidana pemalsuan ijazan.

b. Bagi Pengadilan Negeri Kayu Agung

Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan pemikiran tambahan untuk mempertumbangkan putusan dalam mengadili perkara serupa.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan tambahan pemikiran bagi peneliti yang kelak akan melakukan penelitian dengan konteks yang sejenis

d. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan tambahan kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

D. Penelitian Terdahulu

Sri Andriani.⁸ Telah mengadakan penelitian tentang “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang”. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang adalah, a) pertimbangan yuridis dan: b) pertimbangan nonyuridis. Persamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah mengkaji tentang dasar hukum pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan tindak pidana pemalsuan ijazah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi diatas adalah tahun dan tempat penelitian.

Bonar Simbolon.⁹ Telah melakukan penelitian tentang “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP.” Kesimpulan dari Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP adalah tindak pidana pemalsuan Ijazah merupakan perbuatan dosa besar. Persamaan Skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah mengkaji tentang pandangan Islam mengenai tindak pidana pemalsuan Ijazah. Perbedaan Skripsi dengan penelitian penulis adalah yang membedakannya tempat dan tahun penelitian.

⁸Sri Andriani, Skripsi *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang*. (Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2012)

⁹Bonar Simbolon, Skripsi *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat 1 KUHP*. (Fakultas Syariah Islam Raudhah Palembang 2013)

E. Metode Penelitian

1. Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang didukung dengan penelitian kepustakaan:

a. Lapangan

Yang dimaksud penelitian secara lapangan adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Kayu Agung guna memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Kepustakaan

Yang dimaksud dengan penelitian secara kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari data sekunder yang berupa buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang mempunyai kaitan dengan judul penelitian.

2. sumber Data

Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta dan data yang diperoleh baik dari sumber sekunder maupun sumber primer. Data-data yang dikumpulkan dalam penulisan skripsi ini adalah data kuantitatif. Data kualitatif adalah penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi atau gambar-gambar. Untuk mendukung tercapainya data penelitian di atas, sumber data merupakan bagian dari skripsi yang akan menentukan

keontetikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini sumber data yang dihimpun dari :

a. Sumber Primer

Dokumentasi pada tingkat pertama dalam acara biasa Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 351/Pid.B/2017/PN.Kag. tentang tindak pidana sengaja melakukan pemalsuan surat Ijazah palsu yang lakukan oleh terdakwa AZHAR Bin MARWAH dan dikenakan pasal 263 ayat (2) KUHP dengan menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun.¹⁰

b. Sumber Sekunder

Dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian-kajian pustaka serta mempelajari berbagai literatur, karya ilmiah, jurnal, serta berbagai tulisan yang relevan dengan skripsi yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data¹¹

- a. Metode Penelitian Kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan lain-lain.
- b. Metode Penelitian Lapangan, dipergunakan sebagai data penunjang diperoleh dalam melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Kayu Agung.

¹⁰Op. Cit. Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung

¹¹Pedoman Penulisan Skripsi. Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, Isi Proposal Skripsi. Hlm. 2.

4. Metode Analisa Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data skunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna sturan hukum

F. Kerangka Pembahasan

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kemudian Marwan Mas mengemukakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjek hukum yang mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum itu memang dikehendaki oleh subjek hukum.¹²

Delik menurut pengertian sebagai "*Wesenchau*" telah diikuti oleh para ahli hukum pidana dan yurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran sifat melawan hukum materil. Apakah istilah perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan istilah Belanda "*strafbaar feit* ", dimana arti dari *strafbaar feit* itu sendiri adalah :

¹²Andi Hamzah. *Terminology hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika , 2008). Hlm. 112-113

Simons menerangkan, bahwa *strafbaar feit* ialah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Simons juga berpendapat bahwa *strafbaar feit* adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya (si pelaku). yang dimaksud *strafbaar feit* sebagai delik adalah pelaksanaan/perkosaan kepentingan hukum dan sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum, dimana yang dimaksud dengan kepentingan hukum adalah hak-hak, hubungan-hubungan, keadaan-keadaan dan gangguan-gangguan masyarakat.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.¹³

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHP s/d Pasal 276 KUHP. Tindak Pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP membuat surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik

¹³<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemalsuan> 26 November 2017 03:28

dan Pasal 266 KUHP (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik).¹⁴

Sedangkan di dalam Hukum Islam orang yang melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan surat tidak termasuk kategori sanksi hukum *qishash* dan *had*, maka sanksinya adalah hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman yang ditetapkan syara' dan diserahkan sepenuhnya oleh ulil amri untuk menetapkan, sedangkan para ulama' fiqih mendefinisikan sebagai hukuman yang wajib menjadi hak Allah dan Bani Adam pada tiap-tiap kemaksiatan yang tidak mempunyai putusan tertentu dan tidak pula kafarahnya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi.¹⁵

Pemalsuan ijazah terbagi menjadi dua baik secara fisik maupun secara proses. Pemalsuan ijazah secara fisik sudah tentu memprihatinkan, tetapi yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemalsuan ijazah secara proses.

Hukum Islam syariatkan oleh Allah dengan tujuan pertama merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu atau masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum islam menyangkut seluruh aspek *dharuriyat* (primer), *hajjiyat* (sekunder), maupun (stabilitas sosial). Perbuatan memalsukan surat merupakan perbuatan dusta (bohong), karena pada dasarnya perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni dengan tidak memberikan surat keterangan yang sebenarnya atau sengaja

¹⁴ Jimly Asshiddiqie. *KUHPer KUHP dan KUHP*. (Jakarta: Wacana Intelektual, 2016). Hlm. 558-559.

¹⁵ A. Rahman Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syara)*, Cei 1 (Jakarta: P1. Raja Grafindo Persada, 2002). Hlm. 292.

memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sah maka kalau mempergunakannya dapat menimbulkan kerugian. Didalam al-Qur'an sejumlah ayat yang melarang dengan tegas untuk tidak berbuat dusta (al-Kuẓb). Sebagaimana di dalam firman Allah Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 116 :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا
حَرَامٌ لَّنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يَفْلَحُونَ ﴿١١٦﴾

*"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh manusia secara dusta ini halal dan ini haram, untuk menguak-uuuukan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung."*¹⁶

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Baijuri menegaskan penggunaan ijazah palsu hukumannya menurut ajaran Islam adalah Haram, karna terdapat kecurangan dan kebohongan publik kepada masyarakat.¹⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penulisan penelitian ini dan agar dipahami permasalahannya secara sistematis, maka pembahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung pengertian/pemahaman, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Berikut ini akan penulis gambarkan mengenai sistematika pembahasannyayang terdiri :

¹⁶ Al-Qur'an (16) : 116

¹⁷ <http://news.okezone.com/read/2015/06/03/340/1159449/mui-keluarkan-fatwa-haram-penggunaan-ijazah-palsu>. Diakses pada tanggal: 26/11/2017 Jam: 4:35 WIB

Bab I : Pendahuluan, bab ini merupakan gambaran tentang penelitian, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian kerangka pembahasan, sistematika penulisan, dan daftar pustaka identifikasi dan batasan

Bab II : Tinjauan Umum, Bab ini membahas tentang hukuman secara umum menurut fiqih jinayah mulai dari apa yang dimaksud tindak pidana pemalsuan, sanksi apa yang harus diterapkan dalam tindak pidana pemalsuan, dan melalui cara apa terdakwa memalsukan Ijazah.

Bab III : Pembahasan, Bab ini mengemukakan analisis terhadap dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Kayu Agung untuk tindak pidana pemalsuan putusan Nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag. Serta menguraikan pandangan Islam tentang hukuman tindak pidana pemalsuan Ijazah putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung nomor: 351/Pid.B/2017/PN.Kag.

Bab IV : Penutup, Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semua jawaban atas semua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sedangkan saran dikemukakan untuk memberi masukan kepada pengadilan negeri Kayu Agung dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.